

Kata kunci:

krisis ekonomi; partai pelopor; partai sosial-demokrat; Syriza; pemilihan umum.

Pendahuluan

Sejak kelahirannya kapitalisme tidak dapat dipisahkan dari berbagai krisis yang menyertai (Marx, 2004; Gorz, 2005; Harvei, 2010). Bahkan Marx meramalkan kapitalisme akan runtuh akibat dari krisis internal yang dialami. Namun pada perkembangannya ternyata kapitalisme dapat terus bertahan dan berhasil menghindari setiap krisis. Menurut Francis Fukuyama (1992) setelah berakhirnya perang dingin sejarah dunia telah berakhir dengan kapitalisme dan demokrasi liberal sebagai pemenangnya.

Landasan tesis dari Fukuyama tersebut tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa telah runtuhnya tembok Berlin dan pecahnya negara Uni Soviet yang dianggap merepresentasikan kekuatan sosialis pada masanya. Apalagi ditambah dengan kenyataan lain bahwa beberapa negara yang sering dianggap beraliran sosialis atau kiri saat ini juga tengah pada masa sulit. China dan Vietnam, negara dengan partai tunggal yang terus bertahan namun sistem ekonomi yang dijalankannya menjadi semakin sulit berdasarkan pada pasar kapitalis atau bergerak menuju kapitalisme Negara. Di Korea Utara tetap terjadi pengkultusan personalitas yang totalitarian namun banyak penduduknya yang hidup dalam kemiskinan. Di Kuba muncul keragu-raguan apakah rezim akan tetap bertahan hidup setelah Castro meninggal (Newman, 2006: 209). Sedangkan di Venezuela yang tengah menuju ke cita-cita sosialisme abad-21 kini tengah berada pada konflik akibat serangan dari kaum kanan yang disokong kekuatan negara neoliberal (Martin, 2014).

Namun menjadi tidak berdasar jika menganggap bahwa gerakan kiri atau pertarungan ideologis itu telah tidak ada lagi. Kapitalisme yang erat kaitannya dengan kontradiksi pada kenyataannya telah

memunculkan berbagai bentuk perlawanan. Pada tahun 1994 di negara bagian Chiapas di bagian selatan Meksiko muncul gerakan perlawanan bersenjata oleh para petani dari *Zapatista Army of National Liberation* yang dipimpin oleh Marcos. Gerakan ini menentang *North America Free Trade Agreement* yang dianggap sebagai "death sentence" bagi etnis pribumi Meksiko (Hiariej, 2012: 213-219). Sedangkan di kawasan Amerika Latin, pemimpin berideologi kiri mulai memenangkan ajang pemilu di negaranya masing-masing. Ada Chavez di Venezuela, Evo Morales di Chili, Lula di Brazil serta Rafael Correa di Ekuador (Flamini, 2010: 26).

Itu memperlihatkan bahwa masih tetap mencuatnya gerakan kiri ini dalam dinamika ekonomi politik kekuasaan, apalagi ketika krisis kapitalisme muncul. Pada awal abad ke-21 seiring timbulnya krisis inheren kapitalisme yang melanda Eropa, gerakan-gerakan kiri kembali menguat dengan agenda sosialismenya. Di Yunani ada partai Syriza yang merupakan koalisi kiri radikal berhasil merebut pemerintahan dengan 36,3 persen suara pada Pemilu Januari 2015, kemudian di Spanyol partai Podemos menjadi oposisi yang begitu kuat bagi pemerintah Spanyol dengan gerakan *Indignados* (Iglesias, 2015)

Dalam setiap krisis imanen kapitalisme, gerakan kiri memang mencuat sebagai alternatif lain dari kapitalisme. Studi partai Syriza di Yunani yang mampu memenangkan pemilu Yunani pada tahun 2015 dengan 36,3 persen suara cukup menarik untuk diteliti, karena keadaan ekonomi-politik Yunani yang berada di jantung kapitalisme dunia. Yunani adalah Negara terparah yang terkena imbas krisis ekonomi pada tahun 2008 dan juga Negara pertama paska-krisis yang dipimpin oleh partai berideologi kiri.

Latar belakang sejarah politik Yunani memiliki kemiripan dengan yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 1949 ditengah perang saudara yang dimenangkan oleh kubu militer, gerakan kiri di Yunani disingkirkan dan dihancurkan oleh penguasa militer. Partai *Kommounistikó Kómma Elládas* atau *The Communist Party of Greece (KKE)* kemudian dilarang, anggota mereka ditangkapi. Pada tahun 1955 ada 4.498 tahanan politik dari kaum kiri dan 898 orang buangan; pada tahun 1962 ada 1.359 tahanan dan 296 orang buangan (Voglis, 2002: 223). Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Pada tahun 1965 terjadi pembunuhan enam jenderal dan satu perwira yang kemudian dimanfaatkan oleh faksi militer pro-Soeharto untuk menuding PKI sebagai dalang pemberontakan (Roosa, 2008; Tornquist, 2011). Peristiwa tersebut menjadi pembenaran bagi militer pro-Soeharto untuk menyingkirkan dan membunuh orang-orang kiri serta soekarno (Lane, 2014). PKI dan organisasi *underbow*-nya dibubarkan dan dilarang, sementara sekitar 500.000 sampai 2 juta orang kiri dibunuh tanpa pengadilan (Lane, 2014).

Kemunculan Syriza di Yunani pada tahun 2004 seperti terbentuknya Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia pada tahun 1996. Kedua partai tersebut merupakan partai yang terbentuk melalui koalisi yang dilakukan oleh beberapa organisasi, aktivis, dan eksponen gerakan kiri yang lain. Baik Syriza dan PRD juga terlibat dalam pemilu. Namun kedua partai tersebut mendapatkan hasil yang berbeda. Setelah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 yang membuat rezim Soeharto jatuh dan diadakan Pemilu pada tahun 1999, PRD tidak mampu meloloskan satu pun wakilnya ke parlemen. Sedangkan di Yunani paska krisis ekonomi 2008, dalam pemilu yang berlangsung pada tahun 2012 Syriza menjadi dua besar pemenang pemilu dan pada tahun 2015 Syriza memenangkan pemilu.

Kemenangan yang didapat oleh Syriza juga menyimpan kontradiksi dan

permasalahan dalam strategi yang mereka gunakan. Dengan membuka diri menjadi partai kiri luas telah membuat Syriza mulai menjauh dari tujuan sosialisme yang mereka cita-citakan. Begipula yang terjadi pada PRD. Ketika PRD menggunakan strategi partai kiri luas, kemudian ideologi dari PRD pun bergeser dari sosialisme menjadi nasionalis yang berlandaskan pada figur Soekarno. Dengan pertimbangan diatas, maka penelitian terhadap dinamika gerakan Syriza di Yunani ini menjadi menarik untuk diteliti.

Krisis Kapitalisme dan Konsep Partai dalam Marxisme

Dalam kata penutup karyanya *Das Kapital Volume I* (1987; 1992), Marx menuliskan bahwa "*Lonceng kematian hak milik pribadi kapitalis berdentang, para penjahar akan dijarah*". Kalimat tersebut berusaha ditunjukkan oleh Marx sebagai akibat krisis inheren yang ada dalam tubuh Kapitalisme. Namun thesis Marx bahwa kapitalisme akan hancur dan menggali kuburnya sendiri diakibatkan kontradiksi internal tidak pernah terbukti hingga sekarang. Itu terjadi karena kemampuan kapitalis dalam membuat resep-resep ekonomi politik demi kelangsungan hidupnya serta kemampuannya dalam membuka ruang-ruang baru demi tetap terlaksananya proses akumulasi kapital (Harvey, 2010).

Dalam tradisi Marxian, ada beberapa perspektif ekonomi dalam melihat krisis imanen dari kapitalisme. Secara umum ada 3 teori yang sering digunakan dengan mendasarkan diri pada teks tertentu yang ditulis oleh Marx. *Pertama* teori *over-accumulation* atau teori tekanan atas laba, *kedua* adalah teori *under-consumption* dan *ketiga* adalah teori kejatuhan tendensi tingkat laba (*tendential fall in the rate of profit*).

Merujuk pendapat dari Andre Gorz (2005: 35-47) krisis over-akumulasi terjadi ketika pada tahap lanjut, dalam perkembangannya kapitalisme menggunakan mesin-mesin

untuk mengganti tenaga manusia. Dalam perkembangannya mesin-mesin tersebut pada kenyataannya memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk tetap memproduksi (membeli, merawat dan memperbarui), sehingga untuk dapat menjaga sirkulasi kapital maka diperlukan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana kapital konstan (mesin-mesin) menjadi lebih tinggi dibanding kapital variabel (manusia).

Kedua adalah krisis *under-consumption* semurnya, yaitu terjadinya kesenjangan yang semakin tajam antara kapasitas produksi (hasil produksi) dengan daya beli (konsumsi) dari para buruh. Itu disebabkan karena tergusurnya para buruh oleh mesin-mesin dan juga rendahnya tingkat upah guna meningkatkan faktor keuntungan produksi. Sehingga terjadi sebuah kejenuhan pasar atau resesi dalam pasar. Akibatnya sirkulasi kapital menjadi lambat dan berhenti. Kenyataan itu mengakibatkan kebangkrutan dari para kapitalis, karena proses produksi yang berjalan tidak dibarengi dengan konsumsi yang bersifat ekulibrium (Gorz, 2005: 41-45).

Dari semua itu, pendekatan “kejatuhan tendensial tingkat laba” memiliki basis tekstual yang kokoh dalam karya Marx *Das Kapital* jilid III (Suryajaya, 2013: 284). Hukum kejatuhan tendensial tingkat laba yang dirumuskan oleh Marx bertumpu pada dua asumsi: pertama, ada tendensi historis dalam kapitalisme yang mendorong kenaikan komposisi organik kapital (kenaikan kapital konstan diatas kapital variabel); kedua, tingkat nilai-lebih diandaikan tetap (sebab bila ada kenaikan tingkat nilai-lebih hal ini dapat mengkompensasi kenaikan komposisi organik kapital sehingga membuat tingkat laba tidak jatuh). Kedua hukum tersebut adalah pembuktian imanen bahwa ada masalah akut dalam kapitalisme. Dinaikannya kapital konstan demi penciptaan akumulasi kapital yang berarti semakin meningkatkan produksi komoditas ini akan

menciptakan over-produksi, resesi, spekulasi dan kelebihan kapital. Berbagai kenyataan tersebut berkontribusi bagi terciptanya krisis didalam kapitalisme ini.

Melihat berbagai terori tentang tendensi krisis imanen didalam Kapitalisme yang tidak mungkin terelakkan telah membuat adanya dua kemungkinan, yaitu terjadi rekonstruksi sistem kapitalisme ini sendiri atau runtuhnya kapitalisme karena kebangkitan gerakan kiri. Rekonstruksi sistem kapitalisme dalam menghadapi krisis ini dapat terlihat pada krisis ekonomi di tahun 1970-an, yang dimanfaatkan untuk mengganti pondasi pijakan kapitalisme ini, yaitu dari keynesianisme menuju neoliberalisme (Peet, 2011; Hiariej, 2012). Kemampuan kapitalis untuk merekonstruksi ulang sistemnya ini tidak terpisahkan karena masih begitu lemahnya gerakan kiri sebagai kekuatan *counter-hegemony*. Namun hal tersebut berbeda ketika gerakan sosial dari kelompok kiri cukup kuat.

Dalam tradisi marxis berbicara tentang gerakan sosial maka tidak terpisahkan dari peran penting organisasi dan partai politik. Tradisi marxis melihat bahwa dalam masyarakat tidak ada individu revolusioner yang menjadi penentu perubahan akan tetapi yang ada adalah organisasi revolusioner. Organisasi dan partai politik ini merupakan kendaraan dalam mencapai cita-cita sosialisme dan merebut kekuasaan Negara.

Teori tentang partai dalam Marxisme setidaknya ada dua varian yaitu teori partai sosial-demokrat dan partai pelopor (*Vanguard Party*). Konsepsi tentang partai sosial-demokrat tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Kautsky yang merupakan salah satu pemimpin German Social Democratic Party (SPD) pada awal abad ke-20. Dalam buku berjudul *The Road to Power*, Kautsky menawarkan konsepsi partai, bahwa:

“Partai Sosialis adalah partai revolusioner, tapi bukan partai pembuat revolusi. Kita tahu bahwa tujuan

kami hanya dapat dicapai melalui revolusi. Kita juga tahu bahwa itu hanya sedikit dalam kekuasaan kami untuk menciptakan revolusi ini seperti di kekuatan lawan kami untuk mencegahnya. Hal ini membuat tidak ada pekerjaan kami untuk memicu revolusi atau untuk mempersiapkan jalan untuk itu" (1996 [1910]: 24).

Melalui pemahaman seperti di atas, Kautsky ingin mengatakan bahwa proses revolusi adalah proses dialektika alam, sesuatu diluar kekuasaan individu atau partai politik untuk mempengaruhinya. Atas landasan itu, partai sosial-demokrat seperti yang dilakukan SPD di Jerman menurut pandangan Kautsky harus memfokuskan pada sistem pemilu untuk meningkatkan keterwakilan dalam parlemen. Itu dilakukan sembari menunggu datangnya proses revolusi yang memberikan kekuasaan politik pada partai sosial-demokrat ini. Pandangan kaum sosial-demokrat ini melihat bahwa parlemen adalah tuas yang paling kuat yang dapat digunakan oleh kaum proletariat untuk membawa perbaikan ekonomi dan sosial. Mereka percaya bahwa melalui perjuangan kelas akan membuat parlementer dapat mengubah karakternya dari yang merupakan alat kepentingan kaum borjuis dalam jangka waktu yang panjang mengarah pada pemerintahan sosialis ketika partai sosial-demokrat dapat merebut suara mayoritas dalam pemilu (Kautsky, 2010 [1877]: 188-189).

Kecenderungan dari partai sosial-demokrat ini kemudian adalah bersifat sebagai partai luas (*board parties*) yaitu partai dengan anggota yang begitu besar dengan rekrutmen secara luas. Keadaan tersebut berjejal dengan upaya untuk memenangkan peningkatan keterwakilan di parlemen. Itu didasari bahwa proses pemilu mengharuskan setiap partai untuk memperoleh suara yang sebanyak mungkin untuk dapat mengirim perwakilan ke parlemen dan mendapatkan kekuasaan di

eksekutif, sehingga strategi partai luas menjadi selaras dengan gagasan partai sosial-demokrat ini.

Teori partai pelopor memiliki karakter dan strategi yang berbeda dari partai sosial-demokrat. Lenin sebagai penyetus ide partai pelopor menekankan pada sifat ketat partai atau tidak sembarangan merekrut anggota karena hanya orang-orang yang memenuhi disiplin partai yang dapat bergabung. Poin dari partai pelopor adalah untuk mempersiapkan jalan bagi revolusi bukan menunggu proses tersebut. Artinya partai pelopor harus menghabiskan waktu demi waktu secara sabar terlibat dalam perjuangan yang lebih kecil, baik untuk belajar bagaimana memimpin sebagai individu dan membangun sebuah partai dengan kapasitas untuk memimpin sebuah revolusi sukses di masa depan (Gasper, 2010).

Partai pelopor adalah partai revolusioner yang menurut Lenin sebagai partai yang membawa bersama-sama bagian kelas yang paling sadar dan militan dari kelas pekerja, baik sebelum situasi revolusioner terjadi. Selama periode krisis sosial, partai pelopor dituntut menjadi roda penggerak arah massa pada tuntutan-tuntutan revolusioner (Cannon, 1967).

Bagi kaum sosial-demokrat, model partai Leninis tersebut adalah sebuah model partai anti-demokrasi atau yang telah menghasilkan Stalinisme, karena bertumpu pada sentralisasi demokrasi. Pandangan itu disanggah oleh Andrew Nash (1990) yang menyatakan bahwa yang ditentang Lenin adalah demorkasi borjuasi yaitu demokrasi liberal yang memberikan keistimewaan pada para pemilik modal dan aristokrasi, sehingga Lenin memberikan ide demokrasi proletariat yang bermuara pada demokratisasi ekonomi dan politik melalui piranti diktator proletariat.

Kaum sosial-demokrat berpendapat solusi organisasionalnya untuk mencapai cita-cita sosialisme adalah melalui "partai luas", sebuah partai yang sepenuhnya inklusif atau

sebagai partai pluralis dengan tujuan untuk menggapai massa. Kecenderungan dari partai luas ini adalah tidak membedakan lapisan kelas pekerja baik yang sudah memiliki kesadaran revolusioner, yang reformis, maupun yang berpandangan revisionis. Demi menggapai kursi parlementer, mereka bisa bergabung dalam partai sosial-demokrat yang bersiat luas. Dan hal tersebut berbeda dengan partai pelopor dalam pandangan Lenin (Percy, 2013).

Dalam karyanya *What is to be Done* (1961 [1902]: 41) Lenin mengajukan tesis perlunya sebuah partai pelopor revolusioner yang membimbing dan mengarahkan gerakan buruh mencapai kesadaran sejati tentang sosialisme dan melaksanakan revolusi sosialis. Lenin menekankan perlunya para pelopor yang telah memiliki kesadaran revolusioner untuk memberikan pemahaman dan bergerak bersama para buruh atau rakyat tertindas lain yang kesadarannya belum revolusioner. Tugas kaum pelopor tersebut adalah untuk menyuntikan ide-ide progresif dan memberikan pemahaman revolusioner dalam mendorong proses revolusi sosial.

Dalam dua model partai bertendensi Marxis yang telah dijelaskan diatas memang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dalam kontestasi politik memang diperlukan strategi tertentu agar tidak terjebak pada taktik tertentu karena marxisme bukanlah sebuah dogma akan tetapi sebagai metode berpikir dan bergerak yang bersifat dialektis. Menurut Shandro (1995: 293), membicarakan tesis Lenin berarti harus mengaitkannya dengan konteks ketika Lenin membangun gagasan tentang perjuangan kelas dan partai pelopor yaitu ketika masa kekuasaan rezim Tsar yang bersifat otoriter. Hal tersebut bagi Shandro mendasari kecenderungan bentuk organisasi tertutup, sempit, dan hirarkis yang menjadi strategi partai pelopor revolusioner di Rusia pada masanya.

Gerakan Kiri di Yunani dan Terbentuknya Syriza

Dinamika gerakan kiri di Yunani terus mengalami pasang-surut dari masa ke masa. Pada masa diktator militer berlangsung,⁵ gerakan kiri di Yunani mengalami perpecahan. Itu terjadi pada Februari 1968 dimulai karena adanya perbedaan posisi strategi dalam tubuh KKE⁶ yaitu antara yang ingin tetap menjalankan politik kepeloporan dan yang ingin membuka diri dengan menjadikan KKE (interior).⁷ Krisis yang terjadi di internal KKE ini memuncak pada Agustus 1968 ketika terjadi invasi Uni Soviet ke Praha, KKE (interior) yang memiliki kecenderungan politik *eurocommunism*⁸ mengambil sikap kritis untuk menentang invasi, sedangkan KKE tetap mendukung Uni Soviet. Akan tetapi kedua kelompok KKE tersebut tetap terus bergerak menjadi oposisi pemerintah. Mereka menggunakan strategi-strategi mobilisasi masa, kampanye, propaganda melalui Koran dan juga strategi yang lain, hingga akhirnya kediktatoran militer tersebut runtuh pada

⁵ Masa kediktatoran militer di Yunani dimulai pada tahun 1967-1974 penjelasan lebih mendalam silahkan simak Woodhouse, C.M. (1998). *Modern Greece a Short History*. London: Faber & Faber.

⁶ KKE merupakan partai komunis tertua di Yunani yang mulai terbentuk pada tahun 1917.

⁷ Pembelahan antara KKE dan KKE (Interior) ini disebabkan oleh pandangan politik mereka. Bagi KKE mereka memiliki ikatan sosial dengan kebijakan Uni Soviet sehingga program politik yang dilakukan mengikuti kendali Uni Soviet. Sedangkan KKE (Interior) memiliki pandangan bahwa Negara Yunani harus memiliki analisa tersendiri terhadap Negara mereka dengan mengembangkan teori dan praktik tersendiri yang dalam hal ini bertentangan dengan Partai Komunis Uni Soviet. KKE (Interior) juga menentang upaya invasi Uni Soviet ke Praha sedangkan KKE mendukungnya.

⁸ *Eurocommunism* adalah tren di tahun 1970-an dan 1980-an dari kaum komunis di Eropa Barat untuk mengembangkan teori dan praktek transformasi sosial yang lebih relevan untuk Negara mereka sendiri dan tidak sejalan dengan pengaruh atau kendali Partai Komunis Uni Soviet.

berada pada garis politik sosial demokrat, kelompok sayap kiri, anti-kapitalis, feminis, dan kelompok aktivis lingkungan. Adapun dari 13 organisasi tersebut adalah *Kommounistikí Orgánosi Elládas* (KOE) yang merupakan salah satu organisasi Maois terbesar di Yunani, terdapat pula partai *Internationalist Worker Tendency* (DEA) yang bermula dari tradisi Trotskyis, *Movement for the United in Action Left* (KEDA) yang merupakan sempalan dari KKE, kelompok pembaharuan ekologis kiri atau *Renewing Communist Ecological Left* (AKOA), dan organisasi terbesar dalam koalisi kiri radikal ini yaitu SYN (Spourdakis, 2014).

Koalisi kiri radikal atau Syriza yang dalam internalnya terdiri dari berbagai macam ideologi kiri, membuat terus terjadinya perdebatan dalam arah politik yang akan diambil Syriza. SYN yang merupakan organisasi terbesar dalam Syriza, tendensi politik mereka berawal dari sayap kanan *eurocommunism*, namun semenjak berdirinya Syriza kepemimpinan SYN mau tidak mau mengadopsi banyak program kiri revolusioner semasa pembentukan awal agenda politiknya, sehingga sayap kanan SYN pun akhirnya kehilangan kendali dalam partai pada tahun 2006 (Jakobin Magazine, 22 Januari 2015). Hal ini tentu saja menjadi inspirasi yang krusial dalam memahami pentingnya pertarungan demokratis bagi pemenangan agenda politik revolusioner. Kouvelakis menyebutkan ada dua tingkatan yang membuat Syriza menjadi bertendensi kiri (sosialisme) dan dapat membangun hubungan organik dengan gerakan sosial. **Pertama**, karena dinamisnya sayap pemuda Syriza sehingga membuat mereka mampu berhubungan gerakan anti-globalisasi dan anti rasis. Hal ini menyebabkan Syriza mampu memobilisasi pengaruhnya di kalangan muda, khususnya di kalangan mahasiswa dan pelajar. Kemudian karakter gerakan muda Syriza ini juga dipengaruhi oleh ideologi radikalisme, dan mayoritas mereka mengidentifikasi diri dengan Marxisme,

khususnya aliran Althusserianisme. **Kedua**, peran penting dari gerakan buruh yang memberikan pengaruh terhadap dinamika Synaspismos pada tahun 2000an, menjadi jangkar bagi sayap kiri partai. Meski banyak yang berasal dari KKE (Partai Komunis Yunani), sayap kiri ini memiliki elemen kelas pekerja dan relatif memiliki posisi perjuangan kelas dan sangat kritis terhadap Uni Eropa (Ibid).

Koalisi kiri radikal atau Syriza sejak awal memang dibentuk dalam persiapan menggarungi ajang pemilu. Dalam ajang demokrasi elektoral, gerakan kiri di Yunani melihat pentingnya untuk membangun eksponen partai alternatif. Mereka melihat bahwa PASOK sejak awal terbentuk tidak memperlihatkan ideologi kiri, itu karena tradisi kiri di Yunani erat kaitannya dengan ideologi komunisme serta dalam arti yang luas dan hal tersebut tidak direpresentasikan oleh PASOK dengan paham sosial-demokratnya (Stavarakakis & Katsambekis, 2014).

Sejak pertamakali menggarungi pemilu parlemen Yunani di tahun 2004, Syriza hanya mampu memperoleh 3,3 persen suara dan hanya menempatkan tiga perwakilan mereka didalam parlemen Yunani. Suara yang didapatkan Syriza di pemilu parlemen 2004 masih dibawah KKE dengan 5,9 persen suara dan menempatkan 12 perwakilan mereka diparlemen. Pada pemilu parlemen di tahun 2007, Syriza mampu meningkatkan perolehan suara mereka menjadi 5,0 persen dan menempatkan 14 perwakilan mereka di parlemen, namun di pemilu tahun 2009 perolehan suara Syriza menurun menjadi 4,6 persen (Budgen & Kouvelakis, 2015).

PASOK dan New Democracy (ND) selama tahun 1980-an sampai 2009 secara bergantian menguasai pemerintahan Yunani karena suara yang mereka dulang berdasarkan patronase politik yang telah mereka bangun (Kouvelakis, 2011; Spourdakis, 2014). PASOK dan ND ini bekerja dengan cara jaringan patronase dan yang tidak hanya berarti membangun

oligarki dengan elit politik lama, melainkan juga klientelisme berdasarkan aparat birokrasi, termasuk dalam birokrasi gerakan serikat buruh (Jakobin Magazine, 22 Januari 2015). Sistem politik lama yang bertumpu pada patronase ini telah mampu bertahan sampai hampir 20 tahun, namun ketika krisis ekonomi 2008 mulai menerpa Yunani, sistem politik lama ini mulai tergoncang (Spourdalakis, 2014: 359).

Krisis Ekonomi dan Pengetatan Anggaran: Kontradiksi Politik di Yunani

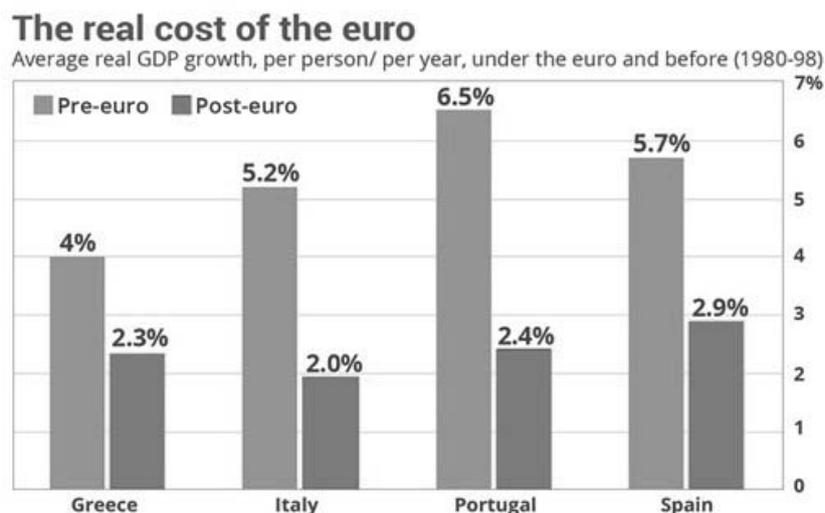
Krisis finansial yang menghantam Amerika Serikat pada 2008 secara bergelombang turut menghantam Uni Eropa dan juga Yunani salah satunya. Kebijakan dari pemerintahan ND (berkuasa 2004 – 2009) di Yunani untuk menyelamatkan bank-bank dan ekonomi Yunani dari dampak krisis global, telah membuat utang publik meningkat secara drastis yaitu mencapai 127 persen dari *Product Domestic Bruto (PDB)*. Akibat dari resesi di seluruh dunia, pendapatan sektor andalan Yunani yaitu sektor pariwisata merosot tajam, aliran kredit rumah berhenti tiba-

tiba, PDB menyusut 2,7 persen pada 2009 serta pengangguran naik menjadi 9 persen (Kouvelakis, 2011).

Badai krisis yang turut menghantam Yunani ini tidak bisa dilepaskan pada kebijakan modernisasi kapitalis yang diusung oleh partai PASOK sejak tahun 1990-an. Setelah keluar dari rezim diktator militer, ekonomi Yunani mengalami depresi yang parah, PASOK dengan menggunakan dana penyesuaian dari Uni Eropa melakukan pengendalian defisit anggaran dan disisi yang lain utang publik terus meningkat serta proses neoliberalisasi kelembagaan negara berjalan. Dibawah kondisi hegemoni neo-liberal dari Uni Eropa melalui perjanjian Maastricht (1992), kemudian moderasi neo-liberal yang diusung PASOK pada 1993-2004 dan pemerintah ND pada 2004-2009, membawa Yunani pada titik dimana badai krisis finansial di AS turut menjalar kesana (Budgen & Kouvelakis, 2015).

Langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintahan konservatif di Yunani dengan mengacu pada moderasi penyesuaian neoliberal, telah membawanya pada peningkatan defisit anggaran. Melebarnya defisit anggaran diikuti dengan meningkatnya rasio hutang per

Tabel 1.
Pertumbuhan Ekonomi Sebelum & Setelah Masuk Zona Euro



Sumber: IMF World Economic Outlook database

PDB yang membuatnya kesulitan dalam memperoleh pembiayaan terhadap defisit yang terus terjadi. Defisit tersebut telah membuat terbatasnya ruang gerak fiskal yang mengakibatkan perlambatan dan bahkan penurunan perekonomian. Data dari IMF menunjukkan bahwa setelah memasuki zona Euro ditahun 2001, pertumbuhan perekonomian Yunani mengalami penurunan dibanding sebelum masuk zona ekonomi Euro yaitu dari rata-rata 4 persen per tahun menjadi 2,3 persen per tahun. Hal yang sama juga terjadi di Negara-negara Italia, Portugal dan Spanyol.

Semakin membesarnya defisit anggaran telah membuat Yunani tidak mampu membayar hutang sebesar 4 miliar euro terutama kepada Perancis dan Jerman. Hutang yang menumpuk dan tidak mampu dibayar tersebut adalah akibat dari akumulasi defisit yang telah lama terjadi dari tahun 1974 setelah Yunani keluar dari rezim junta militer dan secara bergantian dipimpin oleh dua partai besar yaitu PASOK dan ND. Dalam konteks krisis ekonomi global dibawah moderasi neoliberal, adanya defisit dan hutang yang tidak mampu lagi dibayar membuat negara tersebut harus melakukan kebijakan pengetatan anggaran (*austerity*) yang dipandu dengan perjanjian *Bailout*¹³ yang dalam konteks Yunani disokong oleh Troika¹⁴ yaitu *European Central Bank (ECB)* (Bank Sentral Eropa), Uni Eropa dan IMF. Dibawah partai bertendensi konservatif yaitu ND, Yunani melakukan kesepakatan memorandum dengan Troika dengan melakukan pengetatan anggaran dan reformasi neoliberal (Stavrakakis & Katsambekis, 2014).

¹³ *Bailout* merupakan istilah ekonomi dan keuangan digunakan untuk menjelaskan situasi dimana sebuah entitas yang bangkrut atau hampir bangkrut, kemudian diberikan suatu injeksi dana segar yang likuid, dalam rangka untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

¹⁴ Troika merupakan istilah untuk menyebut tiga serangkai yang dalam tulisan ini merujuk pada tiga serangkai ECB, Uni Eropa, dan IMF yang mempromosikan kebijakan neoliberal.

Pada pemilu parlemen yang diselenggarakan pada 7 Oktober 2009 yang merupakan masa awal terjadinya krisis finansial, jaringan patronase dari PASOK dan ND yang meliputi oligarki elit lama yang bersandar pada aparat birokrasi dan serikat-serikat buruh masih tetap berjalan. Pil pahit dari resep kebijakan pengetatan anggaran yang didorong oleh Troika dan dijalankan oleh PASOK serta didukung oleh partai kanan seperti ND memang telah dirasakan rakyat kelas menengah-bawah Yunani, tapi rakyat melalui pengaruh jaringan patronase masih tetap menaruh kepercayaan terhadap PASOK dan ND. Di pemilu parlemen 2009 itu PASOK memperoleh 43,92 persen dan ND meraih 33,47 persen suara. Sedangkan partai bertendensi kiri seperti KKE hanya memperoleh 7,54 persen dan Syriza dengan 4,60 persen suara.

Dua putaran pemotongan anggaran pada bulan Februari dan Maret 2010 masih belum mampu mengurangi defisit anggaran dan membawa Yunani keluar dari krisis finansial. Pada awal Mei 2010, George Papandreou¹⁵ menandatangani *Memorandum of Agreement (MOA)* dengan Troika yang berisi kewajiban Yunani untuk memangkas seperempat gaji dan dana pensiun, melakukan disiplin fiskal serta pemotongan secara radikal anggaran publik (Kouvelakis, 2011). Akibatnya resep-resep kebijakan tersebut membawa Yunani dalam ketidakpastian. Hasilnya cukup mengejutkan pengetatan ekonomi sebesar 20 persen selama empat tahun terakhir, pengangguran telah meningkat, kebangkrutan usaha kecil telah menjamur dan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2014 lebih dari 30 persen dan angka bunuh diri sebagai akibat dari kesulitan keuangan telah empat kali lipat dalam empat tahun terakhir (Spourdalakis, 2014: 354-366). Keadaan yang menimpa Yunani tersebut menurut Gramsci

¹⁵ Perdana Menteri Yunani yang menjabat pada 2009-2011 dan George Papandreou adalah pemimpin partai PASOK pada 2004-2012.

Tabel 2.
Hasil Pemilu di Yunani pada 2009 & 2012¹⁶

Parties	17 June 2012 (%)	6 May 2012 (%)	7 October 2009 (%)
New Democracy	29.66	18.85	33.47
SYRIZA	26.89	16.79	4.60
PASOK	12.28	13.18	43.92
Independent Greeks	7.51	10.62	–
KKE	4.50	8.48	7.54
Golden Dawn	6.92	6.97	0.29
Democratic Left	6.25	6.11	–
LAOS	1.58	2.89	5.63
Other	4.41	16.11	4.55

Sumber: *Stavrakakis & Katsambekis, 2014: 125*

(2013) adalah bentuk dari krisis organik dari kapitalisme. Krisis finansial tersebut pada akhirnya berimbas menuju krisis politik.

Ketidakpuasan terhadap pemerintah semakin meningkat tajam. Gerakan mobilisasi massa semakin radikal sejak Mei 2010, dengan demonstrasi besar, pemogokan umum dan pendudukan Syntagma Square. Pemogokan umum 48 jam pada 19-20 Oktober 2011 menegaskan bahwa siklus ini memasuki tahap baru. Menurut perkiraan, sekitar 300.000 orang demonstrasi di Athena dan setidaknya 200.000 di seluruh negara, dari total populasi 10,5 juta (Kouvelakis, 2011).

Aksi mobilisasi massa dalam jumlah besar sebelumnya belum pernah terjadi pasca-kediktatoran junta militer, paska-krisis organik menimpa Yunani berbagai aksi mobilisasi massa mulai marak dilakukan. Para pemuda Yunani yang 58 persen menjadi pengangguran

akibat dampak krisis tersebut telah mulai akrab dengan aksi protes. Ketidakpastian akan masa depan telah membuat kelas menengah dan kelas bawah semakin frustrasi, marah dan putus asa. Pemerintahan yang dipimpin oleh George Papandreou dari PASOK dan kemudian dikendalikan oleh teknokrat Loucas Papademos yang diusung PASOK, ND dan LAOS¹⁷ telah kehilangan legitimasi mereka. Resep-resep yang dipaksakan oleh Troika yang mereka terima berupa kebijakan penghematan, disiplin fiskal, pemotongan anggaran secara radikal, privatisasi secara besar-besaran dan reformasi struktural yang menuju reformasi neoliberal telah membuat Yunani dalam ketidakpastian dan semakin terpuruk hingga menciptakan krisis politik (Spourdalakis, 2014).

Dari Krisis Ekonomi ke Krisis Politik: Dinamika Pergerakan Syriza

Sampai saat ini hanya di Yunani, di mana bencana ekonomi telah menjadi sangat parah, bahwa sistem dua partai telah runtuh sama sekali, menyebabkan dinamika politik baru (Polymeris, 2012). Dua partai tersebut adalah

¹⁶ Pemilu legeslatif Yunani pada tahun 2012 dijalankan selama dua kali yaitu pada 6 Mei 2012 dan 14 Juni 2012. Hal tersebut dikarenakan hasil pemilu 6 Mei 2012 tidak ada partai yang memenangkan suara mayoritas. Sedangkan ketika dihadapkan untuk membangun koalisi agar memenuhi kuota di legislatif 50%+1, tidak ada satupun koalisi partai yang mampu melakukannya. Oleh karena itu berdasarkan konstitusi Yunani, maka pada bulan depannya harus dijalankan pemilu ulang. Maka akhirnya pada 17 Juni 2012 pemilu legislatif kembali dilaksanakan.

¹⁷ Merupakan partai politik sayap kanan yang terbentuk pada tahun 2000 dan didirikan oleh Georgios Karatzaferis.

PASOK dan ND yang telah mendominasi panggung politik sejak 'perubahan rezim' dari kediktatoran militer ke demokrasi perwakilan di tahun 1974. Dalam pemilu 6 Mei 2012, setelah dua tahun di mana PASOK dan ND berkomitmen untuk langkah-langkah penghematan dari Troika melalui MOA, tidak ada pihak yang berhasil mencetak lebih dari 19 persen suara. Sedangkan LAOS partai yang berkoalisi dengan PASOK dan ND pada pemilu 6 Mei 2012 gagal masuk ke parlemen Yunani.

Hasil pemilu di tahun 2012 telah membawa pukulan yang hebat bagi PASOK. Suara mereka jatuh dari 43,92 persen suara di pemilu 2009 menjadi 13,18 persen suara di Pemilu 6 Mei 2012. ND juga mengalami hal yang sama tetapi tidak separah PASOK, suara ND turun hampir separuhnya dari 33,47 persen suara di Pemilu 2009 menjadi 18,85 persen di Pemilu 6 Mei 2012. Pukulan telak yang diterima PASOK adalah karena PASOK dipandang bertanggung jawab atas krisis ekonomi yang terjadi. Krisis ekonomi di Yunani telah benar-benar menjalar ke krisis politik hingga menciptakan sebuah dinamika politik baru yaitu munculnya Syriza yang merupakan koalisi kiri radikal.

Memanfaatkan runtuhnya *status-quo*, Syriza berhasil mendompleng suara mereka hingga hampir 600 persen. Pada Pemilu di tahun 2009 suara mereka hanya 4,60 persen dan melonjak drastis menjadi 26,89 persen suara pada pemilu parlemen 17 Juni 2012. Hal tersebut memang mengejutkan banyak pihak. Melihat fenomena Syriza tersebut kemudian pertanyaannya adalah strategi apa yang digunakan oleh Syriza? Mengapa Syriza memilih strategi itu? dan apa implikasinya?

Syriza dan Pemilu: Politik Front Populer serta Strategi Antagonisme

Pencapaian yang berhasil dicapai oleh Syriza bukanlah sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit (a-historis), namun ada proses panjang yang memang mereka rencanakan dan jalankan. Dalam dinamika politik ada

yang disebut sebagai "*otonomi relatif*", suatu keadaan dimana terjadinya goncangan pada sistem kekuasaan (seperti krisis finansial dan krisis politik) tidak kemudian secara bersamaan membuat sistem tersebut hancur dan berganti dengan sistem baru. Pelajaran dari krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1970-an, memperlihatkan bahwa sistem kekuasaan lama tidak runtuh, tetapi malahan meronstruksi dirinya yaitu dengan mengganti pondasi pijakan kapitalisme dari Keynesian menuju neoliberalisme (Peet, 2011). Proses rekonstruksi ideologis tersebut dapat dilakukan tak terlepas dari lemahnya gerakan kontra-hegemoni, sehingga penguasa dapat leluasa merumuskan ulang sistem kekuasaan mereka atau dalam bahasa Gramsci (2013) sebagai "revolusi pasif".

Kemenangan Syriza dalam pemilu 2015 adalah 36,3 persen yang sebelumnya menjadi oposisi penting bagi pemerintah pada 2012 sebanyak 26,89 persen didasarkan pada dua strategi. Pertama, front populer (*popular front*). Strategi front populer¹⁸ ini memang bertentangan dengan tradisi politik tradisional dari gerakan kiri. Syriza menempatkan diri mereka sebagai partai luas dan tidak menggunakan strategi politik partai revolusioner yang bertendensi partai pelopor seperti yang diusung KKE. Keberhasilan strategi ini menjadi arus utama gerakan perlawanan didasarkan pada beberapa sifat kunci dari struktur organisasi Syriza.

Komposisi partai yang pluralis dan cukup beragam membuat Syriza menjadi sebuah

¹⁸Front populer ini adalah strategi untuk membuat front politik secara luas dengan melibatkan berbagai organisasi politik yang lain. Strategi front populer cenderung bertendensi kiri luas dan sosial-demokrat. Strategi front populer ini cenderung bersifat kompromis dengan tujuan untuk menggapai suara mayoritas. Itu seperti yang dilakukan oleh koalisi kiri radikal dalam Syriza yang dalam kampanyenya menyatakan tidak akan keluar dari zona Eropa demi tujuan agar suara dari kelas menengah (yang ketakutan ketika Yunani keluar dari zona Eropa) tetap memilih Syriza dalam pemilu. Ketika tidak mau keluar dari zona Eropa maka konsekuensinya Yunani harus dihadapkan dengan MOA-MOA dari Troika.

organisasi yang agak longgar yang jauh dari model partai pelopor Leninis yang lebih bersifat ketat. Itu dapat terlihat dari sistem kaderisasi Syriza dimana ribuan anggota baru membanjiri organisasi lokal partai. Keanggotaan Syriza bahkan menjadi tiga kali lipat setelah krisis terjadi, itu sama sekali tidak jelas apakah partai memiliki waktu dan sarana untuk menyatukan budaya dan perilaku politik dari semua anggota baru tersebut. Itu adalah konsekuensi dari partai luas, sehingga disatu sisi ada kecenderungan untuk menjadi tempat karir politik anggota baru yang terjebak pada oportunistik (Budgen & Kouvelakis, 2015).

Front populer berarti ada berbagai aliran kiri yang berada dalam eksponen gerakan, itu juga yang terjadi dalam tubuh Syriza dengan berbagai faksi kiri didalamnya. Konsekuensi dari front populer dan partai luas ini adalah tidak adanya ideologi tunggal, namun ada berbagai aliran ideologi (walaupun masih dalam tanda petik "kiri") yang kecenderungannya pada titik tertentu akan dikuasai oleh faksi kiri reformis. Dalam tubuh Syriza kelompok ini direpresentasikan oleh faksi SYN. Apalagi SYN merupakan faksi terbesar dalam tubuh Syriza yang pada tahun 2012 memiliki sekitar 16.000 anggota, sedangkan KOE dan AKOA kurang lebih 1.000-1.500 anggota (Jakobin Magazine, 22 Januari 2015).

Kouvelakis (2011) salah satu jajaran petinggi Syriza dari *left platform*, melihat bahwa Syriza mulai mengadopsi program-program revolusioner akibat dorongan dari faksi pemuda revolusioner dan serikat buruh revolusioner. Pengaruh reformis dari SYN menurut Kouvelakis dapat diredam oleh dua faksi tersebut. Namun pertanyaan yang muncul adalah sampai kapan kedua kelompok revolusioner tersebut terus dapat menahkodai Syriza? Itu karena ada tendensi sayap kanan *eurocommunis* yang begitu kuat dalam tubuh SYN yang merupakan mayoritas dalam tubuh Syriza.

Strategi front populer dari Syriza membuatnya tidak hanya menampung

keberagaman, tetapi juga basis konstituen mereka yang secara sosial dan politik diluar koalisi partai. Pada Pemilu Juni 2012, dukungan Syriza tidak datang hanya dari pegawai publik 32 persen, tetapi juga dari penerima upah sektor swasta 33 persen, dari pengangguran 33 persen dan dari pekerja tidak tetap 27 persen. Dukungan yang datang dari pemilik toko kecil 32,6 persen dan profesional 26 persen. Dukungan sosial Syriza ini memang tidak berakar dari serikat buruh, namun ini tidak berarti dukungan sosial kepada partai lemah. Itu karena semua lembaga tersebut *delegitimized* dan mewakili lembaga korup dari sistem politik lama (Spourdalakis, 2014). Strategi front populer ini juga ditunjukkan dengan mengatasnamakan "rakyat" dalam setiap kampanye politik. Seperti poster dari KOE pada gambar 01 dengan slogan "The People Can Do Everything. Vote Syriza".

Gambar 1.
Poster KOE Dalam Pemilu Juni 2012



Sumber: Stavrakakis & Katsambekis, 2014: 129

Strategi kedua yang diusung Syriza adalah antagonisme¹⁹ politik. Strategi ini adalah strategi pemisahan (*antagonism*), yaitu antara “kita” yang terkena dampak penghematan dan “mereka” yang membuka pintu neoliberalisme dengan didikte Troika yang telah membawa Yunani semakin dalam keterpurukan dan ketidakpastian. Wacana yang dibangun oleh Syriza berupaya membangun diskursus bahwa “kita” (rakyat mayoritas) adalah yang terkena dampak penghematan sedangkan “mereka” adalah pengimplementasi kebijakan penghematan ini (Stavrakakis & Katsambekis, 2014: 128-131). “Mereka” disini adalah mengarah pada PASOK, ND, DIMAR²⁰ dan LAOS. Artinya melalui antagonisme ini berupaya dibuat diskursus musuh bersama yang telah menyebabkan krisis ekonomi dan krisis kemanusiaan.

Antagonisme politik yang disusun Syriza dapat dilihat dari slogan kampanye mereka pada pemilu Mei 2012, bahwa “Mereka memutuskan tanpa kita, kita akan bergerak tanpa mereka”(lihat Gambar 2) (Stavrakakis & Katsambekis, 2014). Slogan tersebut menegaskan dua kubu yang berlawanan dengan identitas politik berbeda. Antara “kita” yang memberi harapan dan alternatif lain dari sistem lama dengan “mereka” yang telah menjalankan kebijakan penghematan yang menciptakan resesi, kemiskinan dan pengangguran.

Yang paling jelas adalah permainan kata yang sering digunakan oleh Tsipras (ketua Syriza) tentang ‘*troika exoterikou - troika esoterikou*’ (Troika eksternal – Troika internal) di mana pemerintah koalisi tiga partai antara

ND, PASOK dan DIMAR (Troika internal) disamakan dengan pemberi lembaga donor yang menyokong reformasi neoliberal yaitu EC, ECB dan IMF (Troika eksternal) (*ibid*). Komunikasi politik yang digunakan Tsipras dalam kampanye yang dilakukan memang dengan secara tegas menarik garis damarkasi antara kekuatan pembaharu dengan kekuatan lama atau antara “Yunani Demokratis” dengan “Yunani Oligarkis” dan itu menyerang koalisi yang berkuasa pada pemilu 2010.

Gambar 2.
Poster Kampanye Syriza Pada Pemilu Mei 2012



Sumber: Stavrakakis & Katsambekis, 2014: 130

¹⁹Antagonisme ini merupakan strategi pembalikan terhadap perspektif dan ideologi yang berseberangan, seperti antagonism kelas. Secara sadar mereka melakukan perlawanan dan pemisahan terhadap lawan politiknya.

²⁰ Democratic Left (Dimokratiki Aristera, DIMAR) adalah partai sosial-demokrat yang terbentuk pada 27 Juni 2010. Partai ini dibentuk oleh orang-orang yang kecewa dengan SYN.

Dengan basis front populer yang diusung Syriza dan antagonisme politik yang dijalankan, Syriza telah mampu mendekatkan diri dengan gerakan sosial, seperti gerakan lingkungan, gerakan kelompok imigran, serikat buruh baru dan gerakan sosial lain. Basis konstituen Syriza sebagian besar adalah dari kelas menengah,

itu karena janji kampanye Syriza yang akan mencabut memorandum dengan Troika dan menentang politik penghematan serta disisi yang lain Syriza menegaskan bahwa mereka tidak akan membawa Yunani keluar dari zona Euro (Budgen & Kouvelakis, 2015). Kelas menengah ini memiliki ketakutan akan dampak lebih buruk ketika Yunani harus keluar dari zona Euro dan kembali ke Drachma (mata uang asli Yunani), itulah yang membuat Syriza pada masa kampanye terus menegaskan tidak akan keluar dari zona Euro.

Melalui politik populis yang dibawa oleh Syriza telah mampu membuat suara mereka terus meroket paska-krisis ekonomi 2008 di Yunani (lihat tabel 3). Hal tersebut berbeda dengan apa yang dialami oleh KKE yang jumlah suara mereka cenderung stagnan. Itu adalah konsekuensi dari sikap politik yang diambil KKE dengan bersandar pada aliran partai pelopor dan tidak membuka diri seperti Syriza sebagai partai luas (Charalambous, Jacobin 27 Agustus 2015).

Kemampuan Syriza meyakinkan massa rakyat untuk memilih mereka dengan basis populisme politik yang diusung telah membuat PASOK dan ND, dua partai yang menghegemoni sejak lama runtuh dan suara mereka menurun drastis. Jaringan patronase politik PASOK dan ND menjadi tersendat. Syriza menyuarakan untuk

membangun koalisi kiri luas dengan partai-partai kiri dalam membangun pemerintahan pada pemilu 2015. Itu didasari agar posisi mereka lebih kuat dalam mencabut memorandum dengan Troika, melakukan moratorium pembayaran hutang, meningkatkan pajak progresif pada bisnis besar, dan membawa kontrak bank-bank ke sektor publik.

Melawan Hegemoni Troika dan Perjuangan Syriza

Dalam mengarungi pemilu paska-krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008, Syriza mengalami peningkatan jumlah suara yang pesat pesat. Harapan dari rakyat yang terpukul akibat krisis ini terlihat ketika pada pemilu 2012 Syriza memperoleh 26,9 persen suara dan menjadi oposisi strategis bagi pemerintah saat itu yang dipimpin koalisi PASOK-ND-LAOS. Di Pemilu 2015 Syriza akhirnya memimpin pemerintahan dengan suara 36,3 persen.

Kehadiran Syriza dalam kancah politik di Yunani apalagi dengan suara mereka yang begitu tinggi, telah membuat akademisi, politisi dan media jurnalistik yang anti-kiri menyerang Syriza dan juga Alexis Tsipras. Yannis Stavrakakis & Giorgos Katsambekis (2014) merangkum headline media-media barat ketika Syriza berhasil memperoleh 26,9 persen pada pemilu 2012 bahwa:

Tabel 3.
Hasil Perolehan Suara Syriza dalam Pemilu Parlemen

Parlemen Yunani							
Election	Seats won	±	Size	# of votes	%	Government	Leader
2004	6 / 300	±0	4th	241,539	3.3%	Opposition	Alekos Alavanos
2007	14 / 300	▲8	4th	361,211	5.0%	Opposition	Alekos Alavanos
2009	13 / 300	▼1	5th	315,627	4.6%	Opposition	Alexis Tsipras
05/2012	52 / 300	▲39	2nd	1,061,265	16.8%	Opposition	Alexis Tsipras
06/2012	71 / 300	▲19	2nd	1,655,022	26.9%	Opposition	Alexis Tsipras
2015	149 / 300	▲78	1st	2,246,064	36.3%	Coalition (SYRIZA-ANEL)	Alexis Tsipras

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

“Wartawan Guardian, Helena Smith, menulis tentang pemimpin SYRIZA, Alexis Tsipras, sebagai “populis tak tahu malu”; dalam nada yang sama, majalah Time menggambarkan Tsipras sebagai “Pemuda Komunis yang populis dan anti-penghematan”.... Selain itu pada Juli 2012 Der Spiegel memasukan Tsipras dalam “Sepuluh Politisi Paling Berbahaya di Eropa”.

Dunia kapitalis barat memang memiliki kekhawatiran terhadap mencuatnya Syriza dan tokohnya Alexis Tsipras ini. Mereka mendiskreditkan dan melakukan tekanan terhadap Syriza melalui berbagai diskursus yang mereka bangun. Sedangkan Troika berupaya untuk terus menekan pemerintah Yunani agar menekan resep-resep kebijakan *BailOut* yang diajukan. Apalagi setelah Syriza berhasil menjadi partai berkuasa dengan 36,3 persen suara yang Syriza peroleh pada Pemilu Januari 2015.

Untuk dapat menguasai kursi di parlemen agar 50%+1 demi mendukung program pemerintah, akhirnya Syriza memutuskan berkoalisi dengan ANEL (Partai Yunani Independen yang merupakan pecahan dari *New Democracy*). ANEL sendiri adalah partai sayap kanan tengah yang cenderung berbeda ideologi dengan Syriza. Hal itu terjadi karena KKE dan Antarsya (*Anticapitalist Left Cooperation for the Overthrow*) tidak mau berkoalisi dengan Syriza karena perbedaan pandangan. KKE bahkan menyebut Syriza sebagai penghianat rakyat Yunani karena ketidakberaniannya menentang Komisi Uni Eropa. KKE sejak awal zona Eropa terbentuk pada tahun 2002 mereka dengan konsisten menolak penyatuan ekonomi kawasan ini. Itulah yang membuat KKE dan Antarsya menolak berkoalisi dengan Syriza, dua partai kiri ini kemudian menjadi oposisi bagi pemerintahan yang dibangun antara Syriza dengan ANEL.

Ketidakmampuan keluar dari zona Euro, basis kelas menengah yang pragmatis, koalisi

yang cenderung berseberangan, serta dinamika di internal Syriza yang dikuasi oleh kiri tengah yang cenderung reformis (yaitu SYN) membuat akhirnya Syriza pada perjalanannya mengalami berbagai permasalahan serius untuk membawa keluar Yunani dari badai krisis. Negosiasi tidak setara yang mereka lakukan selama hampir 5 bulan terhitung sejak Januari 2015 hingga terjadinya referendum pada 5 Juli 2015 dimana 61 persen rakyat Yunani memilih “Oxi” artinya menentang ultimatum dari Troika masih terus tidak menemui titik terang (The Guardian, 05 Juli 2015). Dalam melakukan negosiasi utang lawan mereka tidak hanya Troika tetapi tim negosiator mereka juga (Budgen & Kouvelakis, 2015).

Ketidakmauan Syriza untuk keluar dari zona Euro akan tetapi tetap menolak kebijakan pengetatan anggaran memang sedikit banyak menekan langkah mereka sendiri. Syriza yang terus melakukan negosiasi yang cenderung tidak setara dipaksa dan diultimatum untuk menyetujui paket reformasi dari Troika. Syriza pun seolah mengkhianati mandat rakyat Yunani dalam referendum 5 Juli 2015 ketika mereka ternyata tetap menerima memorandum terbaru dengan Troika yang salah satunya berisi bahwa semua aset publik dari Yunani harus dijual untuk diprivitasasi. Memorandum dengan Troika tersebut juga memaksa Yunani untuk membayar hutang yang harus menyedot 60 persen GDP setiap tahunnya pada lima tahun terakhir dan untuk tahun 2015 hutang tersebut telah menyedot 175 persen dari GDP (Kargalitsky, Counterpunch 2 Juli 2015). Padahal pada April 2015 parlemen Yunani telah membentuk tim pencari fakta yang menerbitkan dokumen dengan judul *“Executive Summary of the report from the Debt Truth Committee”* untuk melihat asal muasal utang Yunani yang hasilnya adalah menganggap utang tersebut bersifat illegal dan tidak wajib dibayar (CADTM, 17 Juli 2015). Selain itu Troika telah memutar utang swasta melalui berbagai mekanisme menjadi utang publik ketika krisis tiba.

Langkah reformis yang diambil oleh Alex Tsipras tersebut memang telah membuat perpecahan dalam tubuh Syriza. Pada 21 Agustus 2015, 25 anggota parlemen Syriza menyatakan keluar dari Syriza dan membentuk koalisi kelompok baru bernama "Popular Unity" yang anggotanya sebagian besar berafiliasi dengan "Left Platform". *Popular Unity* melihat bahwa Syriza tidak lagi mampu digunakan sebagai kendaraan untuk membawa Yunani lebih baik setelah terhantam krisis (Sotiris, Jacobin 19 September 2015). Itu karena kendaraan tersebut sudah berbelok arah atau berkhianat dari mandat rakyat Yunani pada pemilu Januari 2015 dan referendum 5 Juli 2015 yang dengan suara bulat menolak drakula Troika. *Popular Unity* ini merupakan mereka yang bertendensi revolusioner didalam koalisi Syriza.

Pecahnya Syriza telah membuat Alexis Tsipras mundur dari kursi PM Yunani (Kompas, 21 Agustus 2015). Sehingga dilakukan Pemilu pada 20 September 2015 untuk mengisi kursi kekuasaan. Hasil Pemilu 20 September 2015 menempatkan Syriza di posisi teratas dengan 35,5 persen suara, ND dengan 28 persen suara, Golden Dawn dengan 7,1 persen, PASOK dengan 6,4 persen suara, KKE dengan 5,5 persen suara, sedangkan Popular Unity tidak masuk parlemen karena hanya memperoleh 2,9 persen suara dan Antarsya hanya 0,8 persen suara (batas masuk parlemen minimal 3 persen suara) (The Guardian, 20 September 2015). Pada Pemilu 20 September 2015 tersebut angka golput sangat besar yaitu 45 persen dari jumlah pemilih Yunani. Besarnya golput tersebut tak terlepas dari kekecewaan rakyat Yunani terhadap kepemimpinan sayap kanan pada 2008 dan 2012 (ND dan PASOK) dan partai sayap kiri Syriza pada 2015.

Kesimpulan

Pemaparan dalam tulisan ini ingin menunjukkan bahwa krisis ekonomi dari sistem kapitalisme hanyalah sebuah momentum, kekuatan gerakan kiri dalam melakukan perlawanan sangat penting menentukan

transformasi politik tentang akan dibawa kemana negara tersebut. Momentum politik dalam setiap krisis ekonomi pasti akan muncul. Studi kasus di Indonesia pada krisis ekonomi ditahun 1998 juga menunjukkan adanya transformasi politik dengan jatuhnya rezim Soeharto yang hampir 32 tahun memimpin Indonesia. Sistem politik tertutup dan pembatasan demokrasi yang dilakukan oleh Soeharto di Indonesia pada masa Orde Baru membuat PRD dan eksponen gerakan kiri berada diluar jalur formal negara dan bergerak ekstra-parlementer. Strategi ekstra-parlementer melalui advokasi politik dan aksi massa berhasil menjatuhkan rezim diktator Soeharto, namun implikasinya PRD tidak mampu berbicara banyak ketika dihadapkan dengan sistem politik terbuka dan berada didalam jalur legal-formal dalam mengarungi Pemilu (Novianto, Kurniawan & Wibawa, 2015).

Setiap strategi politik memang dihadapkan pada kelebihan dan kekuarangan tersendiri. Syriza sebagai partai sosial-demokrat dengan sistem keanggotaan luas memang cenderung selaras dengan strategi front populer yang diusung. Strategi partai luas tersebut telah membuat Syriza sebagai partai sosial-demokrat, namun konsekuensinya mereka harus dihadapkan dengan berbagai ideologi kiri dalam tubuh partai dan juga dihadapkan anggota-anggota baru yang cenderung menggunakan partai sebagai ajang karirisme dan oportuniste. Hal tersebut membuat partai pada titik tertentu menjadi mengarah ke reformisme. Itulah yang terjadi pada Syriza ketika memimpin pemerintah Yunani setelah memenangkan pemilu pada Januari 2015.

Perpecahan dalam tubuh Syriza hingga membuat 25 anggota parlemen Syriza mengundurkan diri dan keluar dari Syriza hingga membentuk koalisi Popular Unity menunjukkan pertarungan pengambilan keputusan dalam partai luas tersebut. Syriza yang pada tahun 2004 dibentuk sebagai koalisi dari berbagai partai, organisasi dan individu

untuk mengaruhi Pemilu memang sejak awal dihadapkan dengan potensi-potensi perpecahan. SYN yang merupakan mayoritas di koalisi Syriza memiliki kecenderungan ideologi kiri-tengah yang reformis, sedangkan KOE, DEA, KEDA dan AKOA memiliki tendensi politik yang radikal progresif. Dua grup sayap koalisi tersebut seringkali bersitegang yang memuncak pada 2015 ketika Syriza memimpin Pemerintahan. Kebijakan dari Alex Tsipras yang bersikap lunak pada Troika dan bahkan menerima memorandum yang diajukan, membuat sayap revolusioner dalam tubuh Syriza menentang keras dan ketika kompromi sudah tidak jalan kemudian mereka keluar dari Syriza.

Pertarungan dalam tubuh Syriza dalam pengambilan keputusan memang pada akhirnya dikuasai oleh sayap reformis dari SYN ketika masa-masa kritis tiba. Politik menekan melalui utang dari Troika dan kekuatan kapitalisme global memang mampu memperlebar perpecahan dalam tubuh Syriza hingga mampu mendorong Syriza melunak.

John Percy (2013) melihat perspektif partai luas sebagai strategi telah banyak mengalami kegagalan seperti yang terjadi di Brazil, Italia, Skotlandia, Inggris, dan Perancis serta di Negara berkembang seperti Selandia Baru dan Indonesia yang mana PRD ideologinya semakin kekanan ketika menjalankan strategi partai luas. Hal senada mulai dialami oleh Syriza di Yunani dimana strategi partai luas memang berhasil untuk memenangkan ajang Pemilu akan tetapi membawa dampak pada perpecahan gerakan kiri dan meningkatnya ketidakpercayaan pada sosialisme yang ditawarkan karena terjerat dengan reformisme yang menjadi kecenderungan model partai sosial-demokrat dan strategi partai kiri luas.

Daftar Pustaka

Cannon, James P. (1967). *The Revolutionary Party & Its Role in the Struggle for Socialism*. International Socialist Review, Vol. 28 No. 5, September-October 1967.

- Flamini, Roland. (2010). *The New Latin America: Will Radicals or Moderates Triumph?*. California: SAGE Publications Ltd.
- Fukuyama, Francis. (1992). *The End of History and The Last Man*. New York: The Free Press.
- Gramsci, Antonio. 2013. *Prison Notebooks: Catatan-Catatan dari Penjara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gorz, Andre. (2005). *Anarki Kapitalisme*. Yogyakarta: Resist Book.
- Harvey, David. (2010). *The Enigma of Capital and the Crisis of Capitalism*. New York: Oxford University Press. Inc.
- Hieriej, Eric. (2012). *Globalisasi, Kapitalisme dan Perlawanan*. Yogyakarta: Institute of International Studies.
- Iglesias, Pablo. (2015). *Understanding Podemos*. New Lef Review 93, May-June 2015
- Kautsky, Karl. (1996 [1910]). *The Road to Power*. Humanity Books.
- Kliman, Andrew. (2011). *The Failure of Capitalist Production: Underlying Causes of the Great Recession*. Pluto Press.
- Kouvelakis, Stathis. (2011). *The Greek Cauldron*. New Lef Review 72, November-December 2011.
- Lenin, V.I (1961 [1902]), *What is to be done? Burning Questions of Our Movement*, New York: International Publishers.
- Marx, Karl. 2004. *Kapital 1: Sebuah Kritik Ekonomi Politik Proses Produksi Kapitalis*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Mavris, Yiannis. (2012). *Greece's Austerity Election*. New Lef Review 76, July-August 2012.
- Nash, Andrew. 1990. *Leninism and Democracy*. Journal of Social and Political Theory, No. 76, The Meaning of 1989(October 1990), pp. 19-32.
- Newman, Michael. (2006). *Sosialisme Abad 21: Jalan Alternatif Atas Neoliberalisme*. Yogyakarta: Resist Book.
- Percy, John. (2013). *Sebuah Tanggapan untuk Strategi Partai Luas*. Dalam *Partai Kiri Luas*

- atau *Partai Revolusioner*. Yogyakarta: Bintang Nusantara.
- Polymeris, Voglis. (2002) *Becoming a Subject: Political Prisoners During the Greek Civil War*, Berghahn Books, 2002, p. 223.
- Shandro, A. (1995). *Consciousness from without: Marxism, Lenin and the Proletariat*. *Science & Society*, 59 (3):, pp.268-297.
- Spourdalakis, Michalis. (2014). *The Miraculous Rise of The "Phenomenon Syriza"*. *International Critical Thought*, 2014 Vol. 4, No. 3, 354–366.
- Stavrakakis, Yannis & Katsambekis, Giorgos. (2014). *Left-wing populism in the European periphery: the case of SYRIZA*. *Journal of Political Ideologies*, 2014 Vol. 19, No. 2, 119–142.
- Tornquist, Olle. (2011). *Penghancuran PKI*. Jakarta: Komunitas Bambu
- Woodhouse, C.M. (1998). *Modern Greece a Short History*. London: Faber & Faber.
- Internet**
- Arends, Brett. (2015). *Europe's secret fear about Greece*. (Online). (<http://www.marketwatch.com/story/europe-knows-greece-will-be-better-off-exiting-the-eurozone-2015-06-16>, diakses 28 Juni 2015).
- Budgen, Sebastian & Kouvelakis, Stathis. (2015). *Greece: Phase One*. (Online). (<https://www.jacobinmag.com/2015/01/phase-one/>, diakses 29 Mei 2015).
- Charalambous, Giorgos. (2015). *What About the Greek Communist Party?* (Online). (<https://www.jacobinmag.com/2015/08/tsipras-syriza-debt-greece-kke/>, diakses 29 Agustus 2015).
- Committee for the Abolition of Third World Debt. (2015). *Executive Summary of the report from the Debt Truth Committee*. (Online). (<http://cadtm.org/Executive-Summary-of-the-report>, diakses 27 Juli 2015).
- Douzinas, Costas & Bourke, Joanna. (2012). *A Syriza victory will mark the beginning of the end of Greece's tragedy*. (Online). (<http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jun/17/syriza-victory-greece-austerity-crisis>, diakses 24 Juni 2015).
- Gasper, Phil. (2010). *Rediscovering Lenin: Lenin led a successful workers' revolution, but are his ideas about organization still relevant today?*. (Online). (<http://isreview.org/issue/88/rediscovering-lenin>, diakses 29 Juli 2015).
- Kagarlitsky, Boris. (2015). *Tsipras and The Vampires*. (Online). (<http://www.counterpunch.org/2015/07/02/tsipras-and-the-vampires/>, diakses 27 Juli 2015).
- Kompas. (2015). *Perdana Menteri Yunani Mengundurkan Diri*. (Online). (<http://internasional.kompas.com/read/2015/08/21/01231151/Perdana.Menteri.Yunani.Mengundurkan.Diri>, diakses 2 Oktober 2015).
- Launtos, Nikos. (2015). *Understanding the Greek Communists*. (Online). (<https://www.jacobinmag.com/2015/01/understanding-the-greek-communists/>, diakses 29 Juni 2015).
- Sotiris, Panagiotis. (2015). *What Populer Unity Can Do*. (Online). (<https://www.jacobinmag.com/2015/09/popular-unity-syriza-lafazanis-tsipras-greece-snap-election/>, diakses 28 September 2015).
- Tsipras, Alexis. (2015). *An End to the Blackmail*. (Online). (<https://www.jacobinmag.com/2015/06/tsipras-speech-referendum-bailout-troika/>, diakses 27 Juli 2015).
- The Guardian. (2015). *Greece Election Result: The Key Numbers*. (Online). (<https://www.theguardian.com/world/2015/sep/20/greece-election-result-the-key-numbers>, diakses 2 Oktober 2015).
- The Guardian. (2015). *Greece Heads Towards Historic No Vote Against Austerity Measures*. (Online). (<https://www.theguardian.com/business/2015/jul/05/greece-referendum-early-results-historic-no-vote-against-austerity>, diakses 2 Oktober 2015).